



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Tindak Lanjut Arahannya Presiden **PENYEDERHANAAN BIROKRASI**



Jakarta, 5 November 2019



1

FOKUS
PEMBANGUNAN
2020-2024

2

RUANG LINGKUP
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

3

LANGKAH KONKRET
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

4

TINDAK LANJUT

OUTLINE

1

FOKUS PEMBANGUNAN 2020-2024

ARAHAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN

DALAM PIDATO PELANTIKAN

- 1 **PEMBANGUNAN
SDM**
- 2 **PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**
- 3 **SIMPLIFIKASI
REGULASI**
- 4 **PENYEDERHANAAN
BIROKRASI**
- 5 **TRANSFORMASI
EKONOMI**



2

RUANG LINGKUP PENYEDERHANAAN BIROKRASI

RUANG LINGKUP PENYEDERHANAAN BIROKRASI

INSTANSI PUSAT

Kementerian

Lembaga
Pemerintah Non
Kementerian

Sekretariat
Lembaga Non
Struktural

Sekretariat
Lembaga
Negara

Lembaga
Penyiaran Publik

INSTANSI DAERAH

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

KLASIFIKASI KEMENTERIAN BERDASARKAN PERPRES NO 68 TAHUN 2019

4

3

18

9

KEMENTERIAN KOORDINATOR

Kementerian Koordinator:
POLHUKAM
Perekonomian
Kemaritiman dan Investasi
PMK

KEMENTERIAN KELOMPOK 1

Kementerian:
Dalam Negeri
Luar Negeri
Pertahanan

KEMENTERIAN KELOMPOK 2

Kementerian:
Agama
Hukum dan HAM
Keuangan
Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan
Sosial
Ketenagakerjaan
Perindustrian
Perdagangan
Energi dan Sumber Daya Mineral

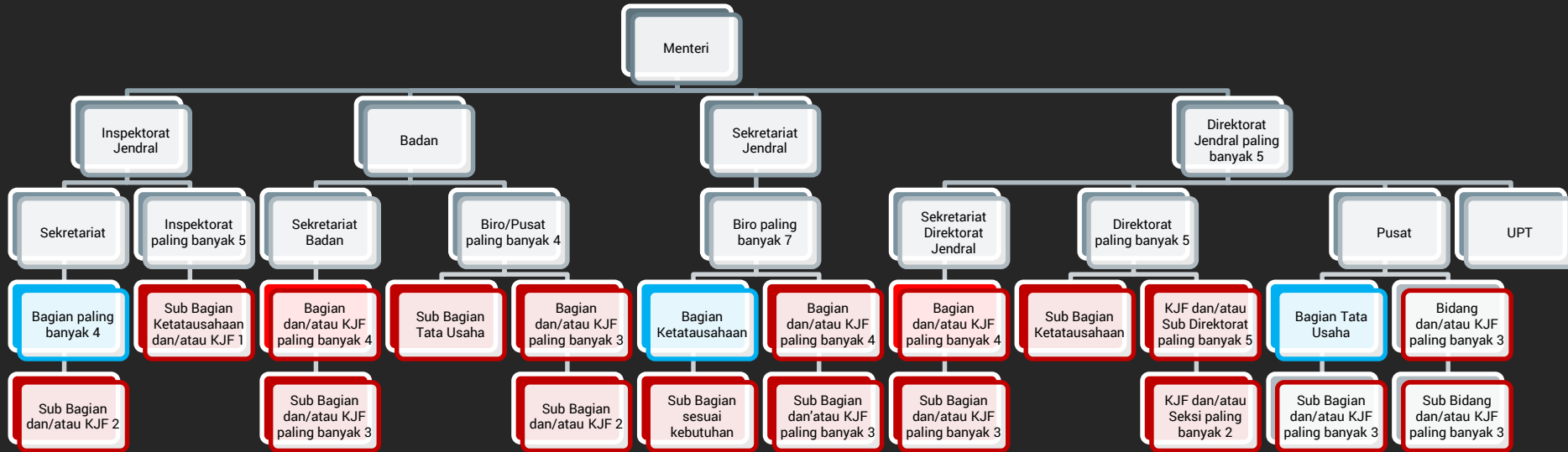
Kementerian:
PUPR
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Pertanian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kelautan dan Perikanan
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
ATR/Badan Pertanahan Nasional

KEMENTERIAN KELOMPOK 3

Kementerian
Sekretariat Negara
PPN/BAPPENAS
PANRB
BUMN
Koperasi dan UKM
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
PPPA
Ristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Ilustrasi Susunan Organisasi

Kementerian Kelompok I, II dan Unit Kerja (2 Level)



KETERANGAN:



CATATAN:

JF di bidang Ketatausahaan:

1. Arsiparis
2. Analis Kepegawaian
3. Analis Anggaran
4. PPBJ
5. Penata Laksana Barang, dst.

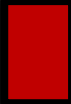
Ilustrasi Susunan Organisasi Kemenko dan Kementerian Kelompok III (2 Level)


CATATAN:

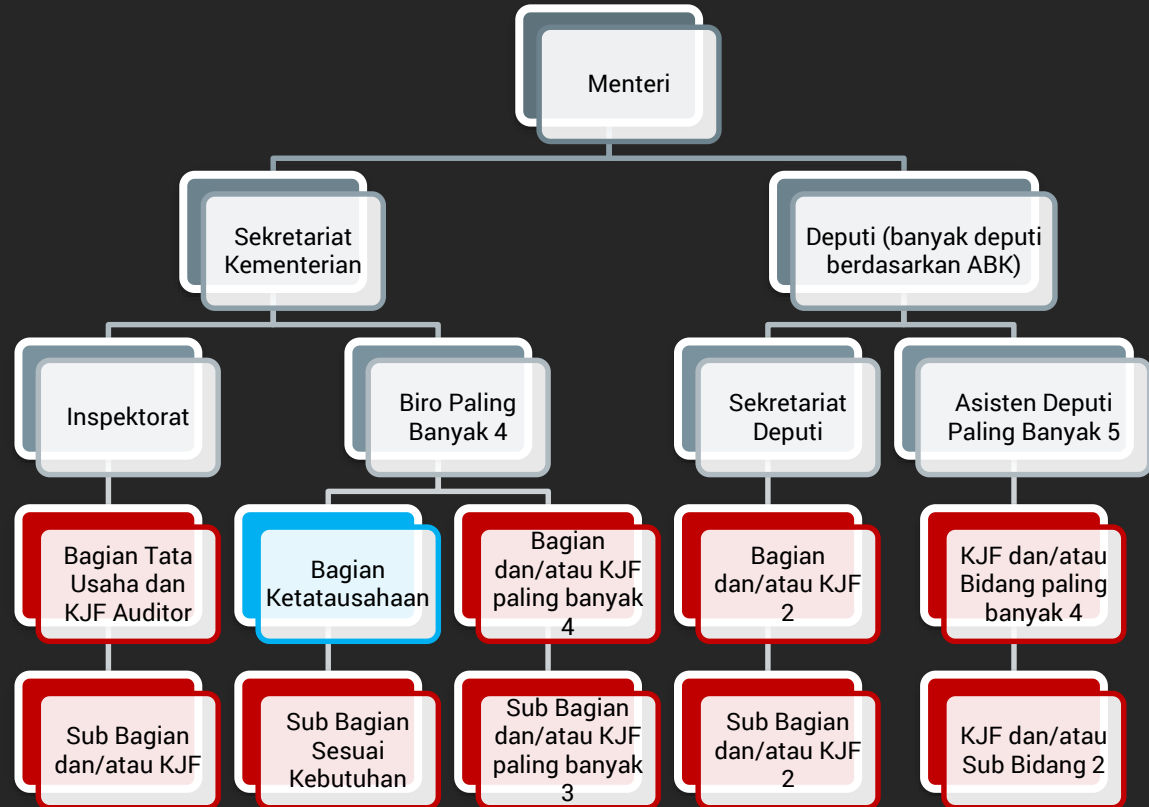
JF di bidang Ketatausahaan:

1. Arsiparis
2. Analis Kepegawaian
3. Analis Anggaran
4. PPBJ
5. Penata Laksana Barang, dst.

KETERANGAN:

 Berpotensi dipangkas

 Dipertimbangkan dipangkas





27

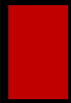
LPNK


1. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
13. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT)
14. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
15. Badan Pusat Statistik (BPS)
16. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
17. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
18. Badan Narkotik Nasional (BNN)
19. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
20. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
21. Badan Intelijen Negara (BIN)
22. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
23. Badan Informasi Geospasial (BIG)
24. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
25. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
27. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)

Ilustrasi Susunan Organisasi LPNK dan Unit Kerja (2 Level)



KETERANGAN:

 Berpotensi dipangkas

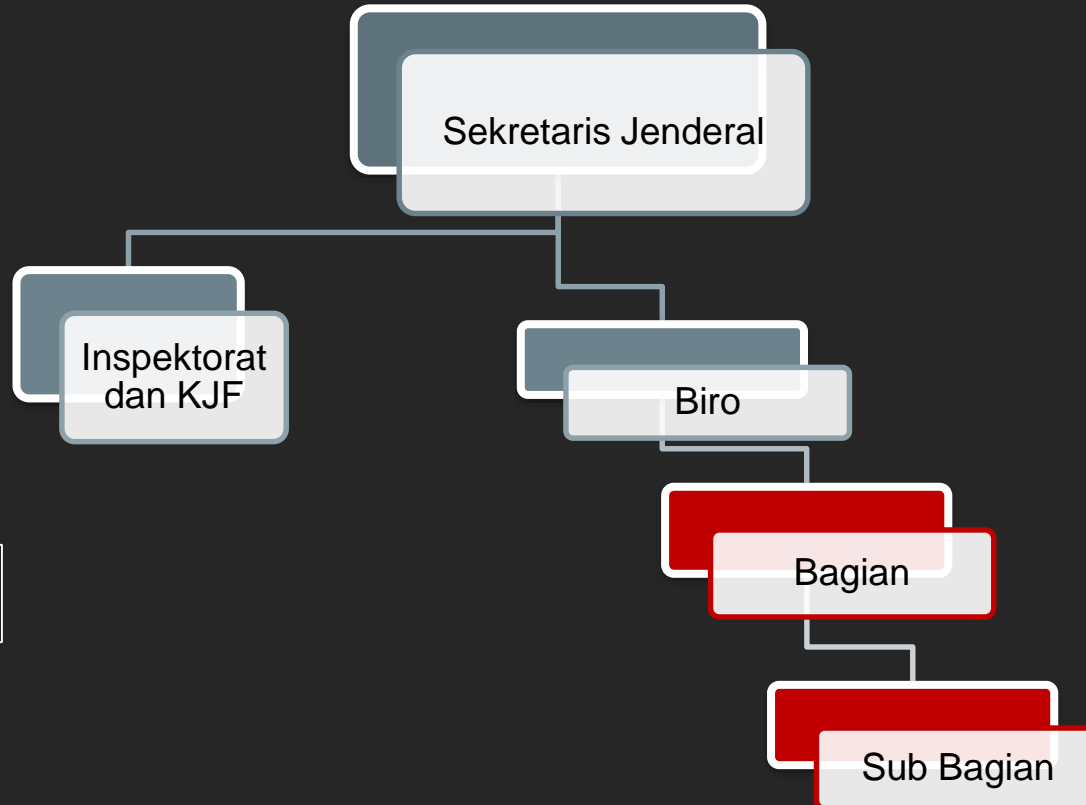
 Dipertimbangkan dipangkas

LNS

1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
2. Badan Amil Zakat Nasional
3. Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
5. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7. Badan Olahraga Profesional Indonesia
8. Badan Otorita Danau Toba
9. Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur
10. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum
12. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
13. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
17. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
18. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
19. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
20. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
21. Badan Restorasi Gambut
22. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
23. Dewan Energi Nasional
24. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
25. Dewan Jaminan Sosial Nasional
26. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
27. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
28. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
29. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
30. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
31. Dewan Ketahanan Nasional
32. Dewan Ketahanan Pangan
33. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
34. Dewan Nasional Keuangan Inklusif
35. Dewan Pengupahan Nasional
36. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
37. Dewan Pertimbangan Presiden • Dewan Riset Nasional
38. Dewan Sumber Daya Air Nasional
39. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
40. Kantor Staf Presiden
41. Komisi Aparatur Sipil Negara
42. Komisi Banding Merek
43. Komisi Banding Paten • Komisi Informasi Pusat
44. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
45. Komisi Kejaksaan
46. Komisi Kepolisian Nasional
47. Komisi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
49. Komisi Nasional Lanjut Usia
50. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
51. Komisi Pemilihan Umum
52. Komisi Pengawas Haji Indonesia
53. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
54. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
55. Komisi Penyiaran Indonesia
56. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
57. Komite Akreditasi Nasional • Komite Anti Dumping Indonesia
58. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
59. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
60. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
61. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
62. Komite Nasional Keuangan Syariah
63. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations
64. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
65. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
66. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
67. Komite Profesi Akuntan Publik
68. Konsil Kedokteran Indonesia
69. Lembaga Kerja Sama Tripartit
70. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
71. Lembaga Produktivitas Nasional
72. Lembaga Sensor Film
73. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
74. Ombudsman Republik Indonesia
75. Otoritas Nasional Senjata Kimia
76. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ilustrasi Susunan

Sekretariat LNS dan Unit Kerja (2 Level)



KETERANGAN:

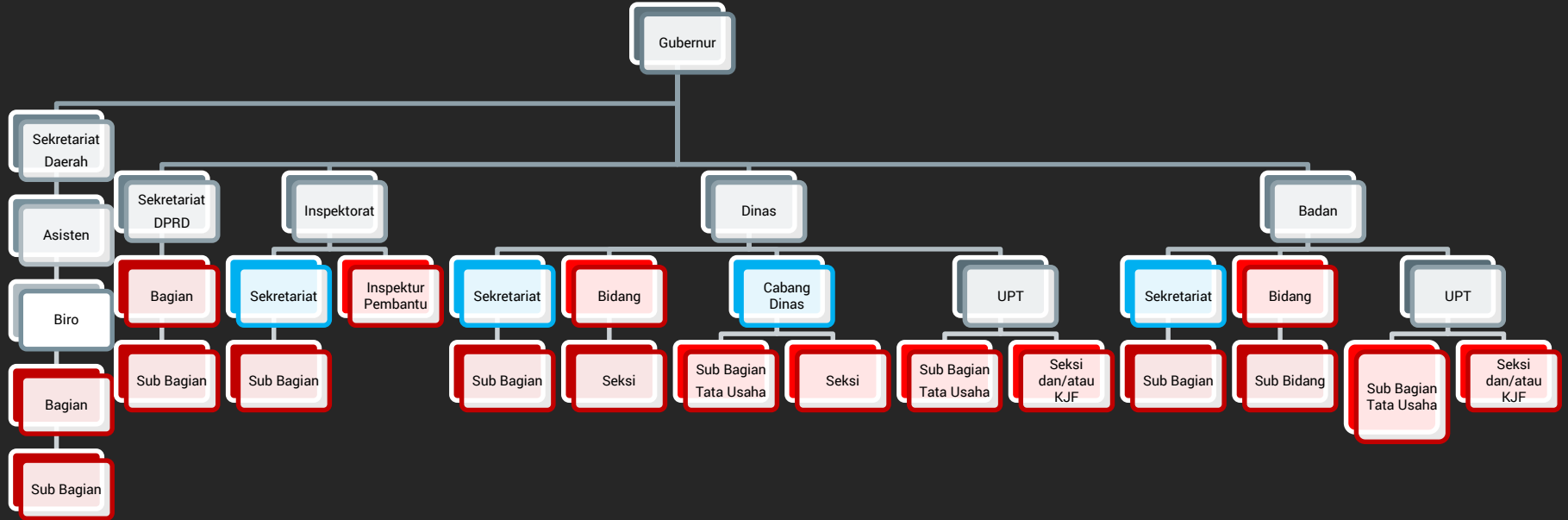
■ Berpotensi dipangkas



PEMERINTAH DAERAH



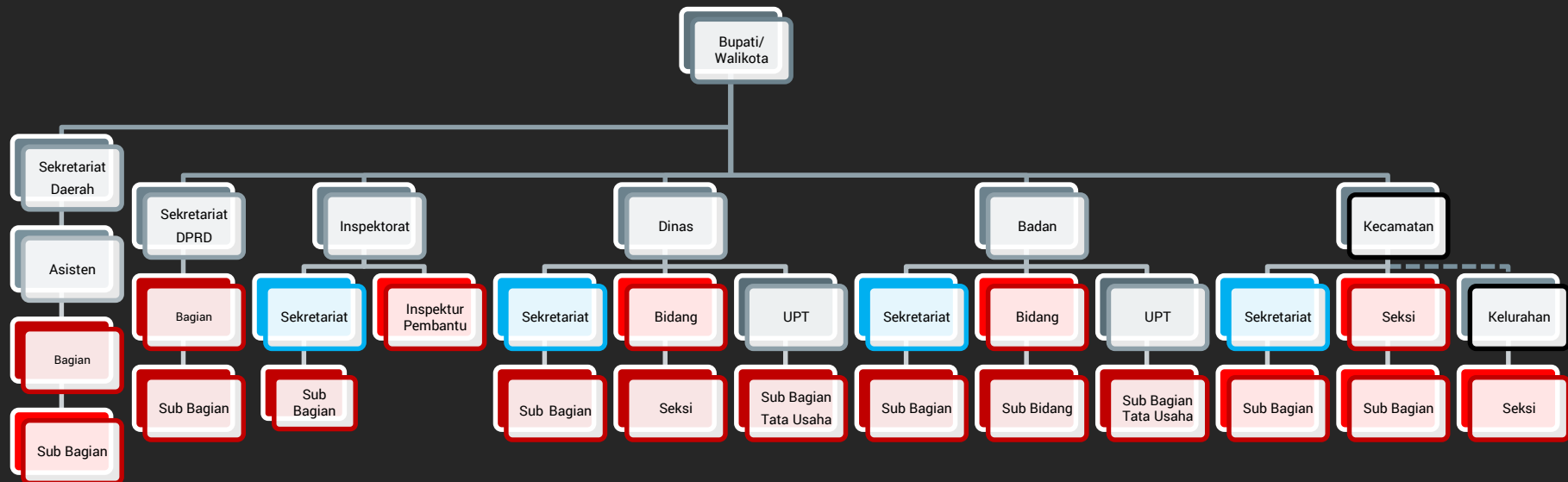
Ilustrasi Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi dan Unit Kerja (2 level)



KETERANGAN:

	Berpotensi dipangkas		Dipertimbangkan dipangkas
--	----------------------	--	---------------------------

Ilustrasi Susunan Organisasi Pemerintah Kab/Kota dan Unit Kerja (2 Level)



KETERANGAN:



3

LANGKAH KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI

LANGKAH KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Penataan Organisasi

- Menentukan kriteria penyederhanaan birokrasi.
- Mengidentifikasi unit yang dapat/tidak dapat disederhanakan.
- Menyusun Peraturan Perundang-undangan untuk penataan organisasi.
- Melaksanakan transformasi/penataan organisasi (Peralihan Jabatan Struktural ke Fungsional).

Penataan Jabatan Fungsional

- Menyesuaikan regulasi tentang JF yang komprehensif (menambahkan informasi faktor jabatan pada tugas **manajerial/decision making**, sehingga 1 jenjang ada beberapa kelas jabatan).
- Menyelaraskan kelas jabatan:
 - JF dengan Jab. Struktural
 - JF satu dengan JF yang lain
- Menyusun Peraturan Perundangan mengenai Jabatan & Pangkat ASN.
- Menyelaraskan tunjangan JF dengan tunjangan Jabatan Struktural (jika masih dimungkinkan).

Transformasi Jabatan

- Menyusun peraturan perundang-undangan penyederhanaan birokrasi.
- Memetakan jabatan dan pejabat struktural yang terkena dampak.
- Memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan jabatan.
- Menyelaraskan kebutuhan anggaran setiap instansi pemerintah.
- Menetapkan masa transisi peralihan.
- Transformasi jabatan dilakukan secara nasional seluruh instansi pemerintah.

BIROKRASI
RAMPING &
EFEKTIF

MENJAMIN
PROGRAM
UNTUK
MASYARAKAT

4

TINDAK LANJUT

RENCANA PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

No	Kegiatan	2019		2020										PIC		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt			
1	SURAT EDARAN MENTERI PANRB: a. Instansi Pemerintah (Pusat & Daerah) untuk Mempersiapkan Tindak Lanjut Arahan Presiden b. Instansi Pembina JF untuk Penataan JF	●														
2	PENATAAN ORGANISASI															
	a. Penentuan Kriteria Penyederhanaan Birokrasi	●														Kementerian PANRB
	b. Identifikasi Unit yang Dapat/Tidak Dapat Disederhanakan	●	●													INSTANSI PEMERINTAH
	c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk Penataan Organisasi	●	●	●	●											Kementerian PANRB
	d. Transformasi Organisasi (Peralihan Jabatan Struktural ke Fungsional)					●	●	●	●	●						INSTANSI PEMERINTAH

UNIT KERJA/ORGANISASI YANG DIPERTIMBANGKAN TIDAK DIPANGKAS:

1. unit kerja sebagai satuan kerja,
2. unit organisasi yang bersifat mandiri (UPT),
3. unit kerja yang membutuhkan otorisasi secara berjenjang, serta
4. unit kerja yang merumuskan kebijakan (peraturan perundangan).



Dengan pertimbangan kriteria umum dan khusus dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana

RENCANA PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

No	Kegiatan	2019		2020										PIC	
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
3	PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL														
	a. Penyelarasan Evaluasi Jabatan terhadap semua Jabatan Fungsional	●	●	●	●	●									-Kem. PANRB -Instansi Pembina JF
	b. Penyusunan Peraturan Perundangan mengenai Jabatan dan Pangkat ASN dalam kaitan dengan Kebijakan Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas ASN	●	●	●	●	●									Kem. PANRB
	c. Penyelarasan Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan Jabatan Administrasi dan Pimpinan Tinggi (jika masih dimungkinkan)			●	●										Kem. PANRB
	d. Penyelarasan Peraturan Menteri PANRB mengenai Jabatan Fungsional	●	●	●	●										-Kem. PANRB -Instansi Pembina JF

RENCANA PELAKSANAAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

No	Kegiatan	2019		2020										PIC	
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
4	TRANSFORMASI JABATAN														
	a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyederhanaan Birokrasi: Transformasi Jabatan Eselon V s.d. Eselon III ke Jabatan Fungsional		●	●				●	●	●					Kem. PANRB
	b. Pemetaan Jabatan dan Pejabat Struktural Terdampak Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	●	●	●	●										INSTANSI PEMERINTAH
	c. Pemetaan Jabatan Fungsional untuk Menampung Peralihan Jabatan Struktural Terdampak Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	●	●	●	●	●									INSTANSI PEMERINTAH
	d. Penyelarasan Kebutuhan Anggaran Terdampak Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi				●	●	●								INSTANSI PEMERINTAH
	e. Penetapan Masa Transisi Peralihan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (<i>Freeze</i>)							●	●	●	●	●	●	●	INSTANSI PEMERINTAH
	f. Transformasi Jabatan secara Nasional													●	INSTANSI PEMERINTAH
5	PENGAWASAN DAN EVALUASI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Kem. PANRB & BKN	

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Kelas JF setidaknya sama dengan kelas Jabatan Struktural sebelumnya.
2. Ketika terjadi perpindahan jabatan, penghasilan setidaknya sama dengan penghasilan pada jabatan struktural sebelumnya.

PEMETAAN SECARA UMUM TERHADAP RUANG LINGKUP DENGAN JENIS JF

NO.	RUANG LINGKUP TUGAS	JENIS JABATAN FUNSIONAL
1.	TATA USAHA, KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none">• ARSIPARIS• PUSTAKAWAN• ANALIS KEUANGAN APBN• PRANATA KEUANGAN APBN• PENATA LAKSANA BARANG• PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA• ANALIS ANGGARAN• ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
2.	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	<ul style="list-style-type: none">• ANALIS KEPEGAWAIAN• ASSESOR SDM APARATUR
3.	INSPEKTORAT	<ul style="list-style-type: none">• AUDITOR• PENGAWAS PEMERINTAH• AUDITOR KEPEGAWAIAN
4.	PERENCANAAN DAN KERJASAMA	<ul style="list-style-type: none">• PERENCANA• PENERJEMAH
5.	PENELITIAN/ANALISIS/KAJIAN/KEREKAYASAAN	<ul style="list-style-type: none">• PENELITI• PEREKAYASA• ANALIS KEBIJAKAN• TEKNISI LITKAYASA

PEMETAAN SECARA UMUM TERHADAP RUANG LINGKUP DENGAN JENIS JF

NO.	RUANG LINGKUP TUGAS	JENIS JABATAN FUNGSIONAL
6.	PENYULUHAN	<ul style="list-style-type: none">• PENYULUH PERTANIAN• PERNYULUH KEHUTANAN• PENYULUH KB• PENYULUH HUKUM• PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT• PENYULUH PERINDAG• PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP• PENYULUH AGAMA
7.	TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA, PUBLIKASI	<ul style="list-style-type: none">• PRANATA KOMPUTER• PRANATA HUMAS
8.	PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PELATIHAN, DAN PENJAMINAN MUTU	<ul style="list-style-type: none">• WIDYAISWARA• DOSEN• GURU• INSTRUKTUR• PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN• PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN• WIDYAPRADA
9.	TEKNIS KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH	<ul style="list-style-type: none">• JF SESUAI DENGAN FUNGSI TEKNIS ORGANISASI• BUAT JF BARU YANG DIBUTUHKAN K/L/D



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH